

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(1), 55–63. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1958>
- Abdurrahman, S. (2024). *DPR Sebut Nadiem Makarim Lamban Tangani Masalah Ferienjob*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/dpr-sebut-nadiem-makarim-lamban-dalam-tangani-masalah-ferienjob-70954>
- Adnan, I., Hamdi, M. R., & Nuriskandar, L. H. (2024). Penggunaan Teknologi dalam Deteksi dan Pencegahan Perdagangan Orang: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 4(1), 156–171. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Afriansyah, R., & Adi, H. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan Lowongan Kerja Melalui Facebook (Studi Kasus di Kepolisian Resor Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), 297–308.
- Alfani, T. N. (2024). Analisis Pasal TPPO dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional dan Organisasi Kemanusiaan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 295–302. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.316>
- Amalia, R. D. (2021). The Effectivness Of The International Organization for Migration (IOM) in Adressing Human Trafficking Against Indonesian Migrant Workers in Malaysia Post-Covid-19. *Journal of International Relations*, 4(2).
- Anggrainy, V. S. (2014). Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 2(1), 55–64. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3977>
- APJII. (2024). *Survei Internet APJII*. <https://survei.apjii.or.id/>
- Archer, C. (2001). *International Organization, Third Edition* (3rd ed.). Routledge.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada.
- AS, N. A. S., Septiani, P. J., Rogida, R., & Lestari, V. A. (2025). Keamanan Manusia Dalam Program Magang Internasional : Studi Kasus Fereinjob Jerman pada Oktober-Desember 2023. *Conference of Social Science, Political Science, and Public Administration*, 50, 73–82.
- ASEAN ACT Partnership Hub. (2019). *Laporan Kinerja Gugus Tugas TPPO 2015-2019*. <https://aseanactpartnershiphub.com/wp-content/uploads/2022/03/IN-NPA-Report-2015-2019-Bahasa.pdf>

- Badiklat Kejaksaan Agung. (2019). *Wakil Jaksa Agung RI Meresmikan Peluncuran Program Penanganan TPPO Berbasis E-Learning*. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/wakil-jaksa-agung-ri-meresmikan-peluncuran-program-penanganan-tp-9a0df>
- Baihaqi, A. I., Salam, S. S., & Warganegara, H. F. (2021). Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization of Migration (IOM). *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*, 2(10), 1–8. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/470/338>
- BBC. (2022). *Kisah WNI dan Warga Vietnam Jadi Korban Penipuan Kartel Judi Online dan Investasi Bodong di Kamboja*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98j8xx4prpo>
- BPK RI. (2007). *Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>
- BPK RI. (2008). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2008*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/42234/perpres-no-69-tahun-2008>
- BPK RI. (2008). *Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- BPK RI. (2021). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 Tahun 2021*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165370/perpres-no-22-tahun-2021>
- BPK RI. (2023). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2023*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/243898/perpres-no-19-tahun-2023>
- BPS. (2024). *Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQwIzI=/persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-kelompok-umur.html>
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Dedy, S. (2024). Pengaruh Konvensi HAM Internasional Terhadap Hukum Indonesia dalam Perspektif Asas Selective Policy. *The Officium Nobile Journal*, 1(1), 62–77.
- Dwiputri, T. R. (2023). Prostitusi Online Sebagai Sarana Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Efritadewi, A., Wardana, N. F., Vidia, U., & Widiyani, H. (2023). ISSN 3031-0369 Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. *CAUSA: Jurnal Hukum Dan*

Kewarganegaraan, 1(10).

- Esther, J., Manullang, H., & Silalahi, J. (2021). Pola Penanganan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 63–77. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.850>
- Fajri, S. K. N., & Nissa, A. C. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi di Era Literasi Digital. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Polirik, Dan Hukum*, 3(4), 421–428.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Fauziah, D. S., Firdaus, A. S., & Kusuma, S. A. G. (2024). Mencegah Human Trafficking: Analisis Implementasi Kebijakan dan Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural di Kalimantan Barat. *Indonesian Foreign Policy Review*, 11(1), 142–164. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14562430>
- Fitri, D. A. S. L. I., Salahuddin, Syamsulrizal, & Zahidi, M. S. (2023). Handling of Human Trafficking in the Modern Era in Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 9(2), 237. <https://doi.org/10.22146/jps.v9i2.79832>
- Haris, A. (2005). *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Holsti, K. J. (1978). A New International Politics? Diplomacy in complex interdependence. *International Organization*, 32(2), 513–530. <https://doi.org/10.1017/S002081830002662X>
- Holsti, K. J. (1988). *International Politics: A Framework for Analysis* (6th ed.). Prentice-Hall International.
- Hull, T. H., Sulistyaningsih, E., & Jones, G. W. (1997). *Pelacuran di Indonesia* (1st ed.). Pustaka Sinar Harapan.
- Ikawati, L. (2022). Penanggulangan Kasus Human Trafficking di Indonesia Melalui Peran International Organization Of Migration (IOM). *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 8(1), 121–132. <https://doi.org/10.32699/syariati.v8i1.2659>
- Ilmih, A. A., & Andriani, N. (2024). Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, Dan Humaniora*, 2(4), 36–47.
- Ilmih, A. A., & Arabel, Y. S. E. (2024). Keterlibatan Organisasi Kriminal Transnasional Dalam Jaringan Perdagangan Manusia. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 575–579.
- IOM Indonesia. (n.d.). *IOM di Indonesia*. IOM. <https://indonesia.iom.int/id/iom-di-indonesia>

- IOM Indonesia. (n.d.). *Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja*. <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja>
- IOM Indonesia. (2020). *Laporan Penelitian Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan*. International Organization for Migration Indonesia.
- IOM Indonesia. (2021). *IOM Indonesia Perkenalkan Informasi Migrasi Tenaga Kerja Terstruktur bagi Pencari Kerja Luar Negeri*. <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-indonesia-perkenalkan-informasi-migrasi-tenaga-kerja-terstruktur-bagi-pencari-kerja-luar-negeri>
- IOM Indonesia. (2021). *Rencana Persiapan dan Respons Covid-19 IOM Indonesia*. <https://indonesia.iom.int/id/rencana-persiapan-dan-respons-covid-19-iom-indonesia>
- IOM Indonesia. (2022). *IOM Memfasilitasi Pemerintah Indonesia dalam Pelatihan Essential of Migration Management (EMM) 2.0*. <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-memfasilitasi-pemerintah-indonesia-dalam-pelatihan-essential-migration-management-emm-20>
- IOM Indonesia. (2023). *Kolaborasi IOM, POLRI, dan INL untuk Meningkatkan Kapasitas Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Perbatasan*. <https://indonesia.iom.int/id/news/kolaborasi-iom-polri-dan-inl-untuk-meningkatkan-kapasitas-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-perdagangan-orang-bagi-aparat-penegak-hukum-di-wilayah-perbatasan>
- IOM Indonesia. (2024). *Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024: Menciptakan Lingkungan Migrasi yang Aman untuk Melawan Perdagangan Orang*. https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2024-menciptakan-lingkungan-migrasi-yang-aman-untuk-melawan-perdagangan-orang?utm_source=
- Iskandar, & Nursiti. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>
- Islam, F. D. N., Vergiawan, G., & Zaluchu, F. H. N. (2024). Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Kinerja Pemerintah. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1961–1971. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3332>
- Ismaidar, & Surbakti, A. P. (2024). Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 6517–6533.
- Kania, Y. P. P., & Wahyudi, S. T. (2024). Pemanfaatan Program Artificial Intelligence Dalam Menangkal Tindak Pidana Perdagangan Orang Di

- Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(4), 761–775.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2024). *2024 Laporan Perdagangan Manusia*. U.S. Embassy in Indonesia. <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>
- Kemenko PMK. (2023). *Berantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Menko PMK: Jangan Ada “Kongkalikong.”* Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://www.kemenkopmk.go.id/berantas-tindak-pidana-perdagangan-orang-menko-pmk-jangan-ada-kongkalikong>
- Kemenko PMK. (2024). *Cegah TPPO, Koordinasi Lintas Sektor Harus Diperkuat.* Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://www.kemenkopmk.go.id/cegah-tppo-koordinasi-lintas-sektor-harus-diperkuat?utm_source=
- KemenPPPA. (2022). *Rapat Koordinasi Tingkat Menteri GT PP TPPO Bahas Urgensi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDMyMQ==#>
- KemenPPPA. (2024). *Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA: Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang.* Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>
- KemenPPPA. (2024). *KemenPPPA: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Multipihak untuk Pencegahan TPPO.* Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTEzMA==>
- Keohane, R. O., & Axelrod, R. (1985). Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies Institutions. *World Politics*, 38(1), 226–254. <https://doi.org/10.2307/j.ctv39x84c.12>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Little Brown.
- Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. *Anterior Jurnal*, 20(2), 84–93. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i2.1795>
- Komnas HAM. (2024). *Keterangan Pers Nomor 15/HM.00/III/2024.* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2024/03/25/330/keterangan-pers-nomor-15-hm-00-iii-2024-komnas-ham-desak-aparat-penegak-hukum-tindak-tegas-perusahaan-dan-seluruh-pihak-terkait-pelaku-tppo-1-047-mahasiswa-ke-jerman.html>
- Komnas HAM. (2024). *Komnas HAM Desak Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas*

Perusahaan dan Seluruh Pihak terkait Pelaku TPPO 1.047 Mahasiswa ke Jerman. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kompas. (2023). *Tumpang Tindih Izin Persulit Perlindungan ABK Migran.* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/08/30/tumpang-tindih-izin-persulit-perlindungan-abk-migran>

Kusuma, R., H., A. S., Husni, H. L., & Ashyadi, Z. (2020). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.8>

Kusumaningrum, C. R., & Wibawa, I. (2024). Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Pengaturan di Amerika Serikat dan di Indonesia. *Action Research Literate*, 8(5), 7–8.

Latonero, M. (2012). Human Trafficking Online: The Role of Social Networking Sites and Online Classifieds. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2045851>

Laukon, D. R., Fadila, L., Edhisty, N. R., Solihat, Z. H., & Hamidah, S. (2024). Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 153–158. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i2.3467>

Makhfudz, M. (2015). Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 225. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.35>

Martin, Y., & Runturambi, A. J. S. (2024). Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(5), 3268–3285. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5.15738>

Maulana, I. (2024). *“Ferienjob”, TPPO, dan Talenta Global Kita.* Kompas. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/31/ferienjob-tppo-dan-talenta-global-kita>

Mauldiyani, S., & Prasetyo, H. (2024). Signifikansi Hukum Pidana Internasional dalam Kasus Perdagangan Manusia Terhadap Wanita dan Anak-Anak Lintas Negara. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(3).

Menpan. (2023). *Begini Strategi Kominfo Mencegah Masyarakat Terjebak TPPO.* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/begini-strategi-kominfo-mencegah-masyarakat-terjebak-tppo>

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muliadi, & Adnan, I. (2024). Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia. *AL-BALAD: Jurnal Hukum*

Tata Negara Dan Politik Islam, 4(2), 23–42.
<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar>

Nabih, M. H. F., Amanda, A. S. R., & Syiyam, L. (2023). Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26219–26225.

Nisa, Z. V. K., & Ilmih, A. A. (2024). Moralitas dalam Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum: Mencegah Perdagangan Orang dan Melindungi Data Pribadi di Era Digital Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 303–313.

Nola, L. F. (2023). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 14(2), 143–161.

Nugrahaningsih, N., Alunaza, H., & Lutfie, R. Z. (2020). The Role of International Organization for Migration in Handling Human Trafficking in Sambas Regency, West Kalimantan Province. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1).
<https://doi.org/10.18196/hi.91163>

Nuraeny, H. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sinar Grafika.

Nurhidayat, D. (2024). *Kemendikbud-Ristek Sebut Ferienjob Tidak Pernah Jadi Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Media Indonesia.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/660383/kemendikbud-ristek-sebut-ferienjob-tidak-pernah-jadi-bagian-merdeka-belajar-kampus-merdeka>

Nurrahmah, E. I., Mutthu, Z. Z., Monoarfa, N., & Kleden, K. L. (2023). Tantangan dan Strategi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 2, 1–17.

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. (2005). *U.S. Department of State 2005 Trafficking in Persons Report - Indonesia*. United States Department of State.
<https://www.refworld.org/reference/annualreport/usdos/2005/en/43559>

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. (2020). *2020 Trafficking in Persons Report: Indonesia*. United States Department of States.
<https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/indonesia/>

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. (2023). *2023 Trafficking in Persons Report: Indonesia*. United States Department of States.
<https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/indonesia/>

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. (2024). *2024 Trafficking in Persons Report: Thailand*. United States Department of State.
<https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/thailand/#:~:text=The 640 trafficking victims provided,Kenya%2C PRC%2C Rwanda%2C South>

- Puanandini, D. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 257–270. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938>
- Puanandini, D. A., Turyadi, L. D., & Saputra, M. A. (2024). Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan, Dan Hukum*, 3(3), 89–95. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1096>
- Putri, D. A. A. (2019). Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015. *Journal of International Relations*, 5(1), 998–1006. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id/>
- Putri, M. A., Santoso, M. P. T., & Hakiem, F. N. (2024). Peran Kerjasama Mutual Legal Assistance sebagai Upaya Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18656–18663. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12846%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/12846/8648>
- Putri, R. F. (2021). Kerjasama Keimigrasian Indonesia Dengan Organisasi Internansional Untuk Pengungsi. *Journal of Administration and International Development*, 1(2), 19–36.
- Putri, S. N., & Bakhtiar, H. S. (2024). Human Trafficking in Ferienjob Internship Programmes: Analysis of Legal Regulation and Responsibility. *Syiah Kuala Law Journal*, 8(3), 384–399.
- Ramadhani, S. R., Haryadi, F. A., & Apsari, N. C. (2023). Peran International Organization for Migration Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49289>
- Resa, M. K., & Jaya, N. S. P. (2021). Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 161–171. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.161-171>
- Rizti, F. (2024). 185,3 Juta Pengguna Internet Tercatat di Indonesia pada 2024. Good Stats. <https://data.goodstats.id/statistic/1853-juta-pengguna-internet-tercatat-di-indonesia-pada-2024-JFNoa>
- Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 231–243. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>
- Rosenberg, R. (2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*.

International Catholic Migration Commission.

- Saputra, F. S., & Lawoleba, K. K. (2024). Modus Operandi Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 6(1), 400–418.
- Saragih, E., & Alfajri. (2022). Upaya IOM (International Organization for Migration) dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia Tahun 2017-2022. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5(01), 39–57.
- Sarkar, S. (2015). Use of Technology in Human Trafficking Networks and Sexual Exploitation: A Cross-sectional Multi-country Study. *Transnational Social Review*, 5(1), 55–68. <https://doi.org/10.1080/21931674.2014.991184>
- Sary, D. V. (2022). Motivasi ASEAN dalam Upaya Penanganan Kejahatan Transnasional (Studi Kasus: Implementasi MLA (Mutual Legal Assistance) di Wilayah Asia Tenggara). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5(01), 16–22. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14463%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/download/14463/5690>
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (5th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaya, P. S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Orang di Indonesia: Studi Kasus Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007. *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 2(1), 13–18.
- Tarihoran, E. R., & Anisah, A. N. (2024). Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 1–21.
- The Bali Process. (n.d.). *Bali Process*. Bali Process. <https://www.baliprocess.net/>
- The Embassy of The Republic of Indonesia in Berlin. (2023). *Ferienjob*. Indonesian Embassy. <https://indonesianembassy.de/news/ferienjob-kerja-paruh-waktu-dalam-masa-libur-ferienjob-bukan-kerja-magang-ferienjob-adalah-bagian-dari-job-market/>
- Tri. (2020). *BP2MI Antisipasi Peningkatan Gelombang Kepulangan Pekerja Migran Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19*. BPBD Provinsi Bali. <https://erelawan.baliprov.go.id/article/1914/bp2mi-antisipasi-peningkatan-gelombang-kepulangan-pekerja-migran-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19>
- U.S. Embassy Malaysia. (2024). *2024 Trafficking in Persons Report: Malaysia*. U.S. Embassy in Malaysia. <https://my.usembassy.gov/2024-trafficking-in->

persons-report-malaysia/#:~:text=The government identified 165 confirmed,sex trafficking and 144 exploited

United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). *Global Report on Trafficking in Persons*. United Nations. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip_2009.html

Utami, L. D. (2023). *Kemlu Ungkap Awal Mula Banyak WNI Jadi Korban Penipuan Kerja Online Scam di Kamboja*. Tribunnews. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/03/08/kemlu-ungkap-awal-mula-banyak-wni-jadi-korban-penipuan-kerja-online-scam-di-kamboja>

Wangko, J. P. I., Umbu, N., & Fretes, C. H. J. De. (2025). Peran Imigrasi Manado dalam Mencegah Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural ke Kamboja. *Jurnal Niara*, 17(3), 108–118.

Wardah, F. (2023). *Mengapa Kasus Perdagangan Orang Terus Meningkat?* VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-kasus-perdagangan-orang-terus-meningkat-/7205800.html>

Yuliandari, R., Bintang, H. J., & Zarzani, T. R. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terhadap Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Medan. *Journal of Mandalika Literature*, 14(2), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/32584/31365>

Yunardi, A. N. (2022). Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i2.5600>

Yuwono, S., Djaja, M., Parjoko, Maesuroh, Hardijanto, P., Wagiran, Indarty, W. T., Sunaryo, G., Soedibjo, S., Rahmawati, R., Susilowati, E., & Rahayu, B. (2005). *The Elimination of Trafficking in Persons in Indonesia*. Ministry Coordinating For People's Welfare.

Zarbiyani, F., & Djaja, B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wni Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 379–387.